

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengendalian internal merupakan suatu proses, yang dipengaruhi oleh dewan direksi entitas, manajemen, dan personel lainnya, yang dirancang untuk memberikan jaminan yang wajar terkait pencapaian tujuan yang berkaitan dengan operasi, pelaporan, dan kepatuhan Johnstone *et al* (2015:86). Menurut Wakhyudi (2018:12), pengendalian internal adalah suatu cara yang berisi seperangkat kebijakan dan peraturan untuk mengarahkan, mengawasi, dan melindungi sumber daya organisasi/perusahaan agar terhindar dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan dan penyelewengan.

Zamzami *et al* (2018:71) menjelaskan pengendalian internal adalah konsep dinamis yang berjalan di dalam organisasi yang merupakan kebalikan dari serangkaian prosedur dasar. Pengendalian internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi entitas, manajemen dan personel lainnya, yang dirancang untuk memberikan kepastian yang beralasan terkait dengan pencapaian sasaran kategori sebagai berikut: efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (Rama, 2008:132).

Rama *et al* (2008:132) mengatakan pengendalian internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi entitas, manajemen dan personel lainnya, yang dirancang untuk memberikan kepastian yang beralasan terkait dengan pencapaian sasaran kategori sebagai berikut: efektivitas dan efisiensi

operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Hery (2014:12) juga mengatakan pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan hukum/undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan.

Laporan keuangan adalah informasi keuangan yang disajikan dan disiapkan oleh manajemen dari suatu perusahaan kepada pihak internal dan eksternal, yang berisi seluruh kegiatan bisnis dari satu kesatuan usaha yang merupakan salah satu alat pertanggung jawaban dan komunikasi manajemen kepada pihak-pihak yang membutuhkannya. Laporan keuangan merupakan seperangkat laporan keuangan formal (*full set*) yang terdiri dari:

1. Neraca (*balance sheet*), yang menggambarkan posisi keuangan dari satu kesatuan usaha yang merupakan keseimbangan antara aktiva (*assets*), utang (*liabilities*), dan modal (*equity*) pada suatu tanggal tertentu.
2. Laporan laba rugi (*income statement*) merupakan ikhtisar dari seluruh pendapatan dan beban dari satu kesatuan usaha untuk satu periode tertentu.
3. Laporan perubahan ekuitas (*statement of changes of equity*) adalah laporan perubahan modal dari satu kesatuan usaha selama satu periode tertentu, yang meliputi laba komprehensif, investasi dan distribusi dari dan kepada pemilik.
4. Laporan arus kas (*cash flow statement*) berisi rincian seluruh penerimaan dan pengeluaran kas baik yang berasal dari aktivitas operasional, investasi dan pendanaan dari satu kesatuan usaha selama satu periode tertentu.

5. Catatan atas laporan keuangan (*notes to financial statement*) berisi informasi yang tidak dapat diungkapkan dalam keempat laporan keuangan di atas, yang mengungkapkan seluruh prinsip, prosedur, metode, dan teknik yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan tersebut (Yadiani 2007:51).

Hal senada juga diungkapkan oleh Hanafi (dalam Kariyoto 2017:163) laporan keuangan adalah laporan yang diharapkan bisa memberikan informasi mengenai perusahaan, dan digabungkan dengan informasi yang lain, seperti industri, kondisi ekonomi, bisa memberikan gambaran yang lebih baik tentang prospek dan risiko perusahaan. (Hantono 2018:1) juga mengungkapkan laporan keuangan merupakan informasi yang menggambarkan dan untuk menilai kinerja perusahaan, terlebih lagi perusahaan yang sahamnya telah tercatat dan diperdagangkan di bursa. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan untuk menilai kinerja perusahaan yang juga mencerminkan fundamental perusahaan sehingga informasi tersebut dapat memberikan landasan bagi keputusan investasi.

Myer (dalam Amrin 2009:170) juga mengatakan laporan keuangan itu adalah dua daftar yang disusun oleh akuntan pada akhir periode untuk suatu perusahaan. Kedua daftar itu berupa neraca atau daftar posisi keuangan dan daftar pendapatan atau rugi-laba. (Hery 2015:5) mengungkapkan bahwa laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan kata lain, laporan keuangan ini berfungsi sebagai alat informasi yang menghubungkan perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan.

Terdapat 14 temuan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2016 yang perlu ditindak lanjuti oleh masing-masing kementerian dan lembaga. Temuan tersebut mencakup dua aspek, yakni sistem pengendalian internal. BPK menemukan 11 masalah terkait kelemahan sistem pengendalian dalam pemeriksaan laporan keuangan 15 entitas AKN I yang antara lain meliputi Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Lembaga Sandi Negara, Badan Intelijen Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Keamanan Laut, Komnas Hak Asasi Manusia, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Narkotika Nasional, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, dan Badan SAR Nasional.

BPK menemukan kelemahan sistem pengendalian internal di antaranya penerapan basis akrual belum memadai, penetapan status asset tetap belum tuntas, penataan persediaan belum memadai, pemanfaatan barang milik Negara belum sesuai ketentuan, lemahnya pengelolaan kas, penatausahaan piutang paten kurang memadai, serta pencatatan dan pelaporan hibah belum memadai.

BPK juga menyebutkan ada 3 sektor utama permasalahan yang berpengaruh kepada ketidakpatuhan penyusunan laporan keuangan yakni kelemahan sistem pengendalian internal berupa *Standard operating procedure* (SOP) belum disusun atau tidak lengkap. Pada intinya, temuan BPK atas laporan keuangan Pemprov Jatim tahun anggaran 2014 yakni terkait Sistem Pengendalian Intern. Dari hasil pemeriksaan atas Sistem pengendalian intern (SPI), ada beberapa temuan-temuan seperti, pembukaan rekening kas di setiap SKPD dianggap tidak tertib dan tidak sesuai dengan ketentuan.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: “Seberapa besar pengaruh pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan.

1.3 Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan membuktikan secara empiris adanya pengaruh pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang dan untuk meraih gelar sarjana (S1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha.

2. Bagi penelitian selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi khususnya bagi pihak-pihak lain yang meneliti dengan kajian yang sama yaitu sistem pengendalian internal dan kualitas laporan keuangan.

3. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghimpun informasi sebagai bahan sumbangan pemikiran untuk dijadikan sebagai bahan masukan dan

pertimbangan bagi perusahaan guna meningkatkan kinerja dalam penyusunan laporan keuangan.

